



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2026**

KATA PENGATAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban serta akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan serta penggunaan anggaran, juga sebagai media informasi kepada publik atas capaian kinerja organisasi berdasarkan perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang memberikan informasi kinerja secara akurat dan obyektif pada stakeholder untuk menciptakan kinerja yang lebih baik, demikian laporan kinerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat.

Benteng, Januari 2025

KEPALA BAPPERIDA 


Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19840104 200903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB.I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.	1
I.2. Maksud dan tujuan	1
I.3. Gambaran Umum Organisasi	1
1.3.1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3.2. Struktur Organisasi	3
1.3.3. Cascading Kinerja	4
1.3.4. Dukungan SDM, sarana prasarana dan anggaran	5
I.4. Isu – Isu Strategis	8
I.5. Tindak lanjut atas LHE Sakip Tahun 2024	9
BAB.II. PERENCANAAN KINERJA.	12
2.1. Rencana Strategis.....	12
2.1.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida	15
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
2.2. Indikator Kinerja Utama	17
2.3. Rencana Kerja Tahunan	18
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
BAB.III. Akuntabilitas Kinerja	27
3.1. Pengukuran Kinerja	27
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	29
3.2.1. Pengukuran Capaian Tujuan ke-1	29
3.2.1.A Pengukuran Capaian Sasaran ke-1	32
3.2.1.B Pengukuran Capaian Sasaran ke-2	51

3.2.1. Pengukuran Capaian Tujuan ke-2.....	55
3.2.2.A Pengukuran Capaian Sasaran ke-3	56
3.3. Realisasi Keuangan	60
BAB.IV. PENUTUP	78
Lampiran.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah pegawai ASN berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	5
Tabel 1.2.	Jumlah pegawai ASN berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025.....	6
Tabel 1.3.	Jumlah pegawai ASN yang menduduki jabatan Tahun 2025.....	6
Tabel 1.4.	Jumlah Aset Bapperida Kep. Selayar per Desember 2025.....	7
Tabel 1.5.	Perbandingan dukungan anggaran tahun 2021 dan tahun 2024.....	8
Tabel 1.6.	Rumusan Masalah dan Isu Strategis.....	9
Tabel 2.1.	Ringkasan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi RPJMD Kab. Kep Selayar Tahun 2021-2026.....	13
Tabel 2.2.	Matriks Tujuan dan Sasaran Strategis.....	15
Tabel 2.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bapperida Kep. Selayar Tahun 2021-2026.....	16
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2021 – 2026.....	18
Tabel 2.5.	Croscutting Sasaran Program dan Anggaran Rencana Kerja tahun 2025.....	18
Tabel 2.6.	Rencana Kerja Bappelitbangda Kep Selayar Tahun 2024.....	20
Tabel 2.7.	Perjanjian Kinerja Bapperida Kep. Selayar Tahun Anggaran 2025.....	26
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 3.2.	Capaian IKU Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.....	28
Tabel 3.3.	Capain Kinerja Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.....	28
Tabel 3.4.	Target dan realisasi kinerja tujuan ke-1.....	29
Tabel 3.5.	Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024.....	30

Tabel 3.6.	Target dan realisasi kinerja sasaran ke-1.....	32
Tabel 3.7.	Crocutting Sasaran Program Kegiatan.....	33
Tabel 3.8.	Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan program prioritas daerah tahun 2025.....	37
Tabel 3.9.	Crocutting Sasaran Program Kegiatan.....	49
Tabel 3.10.	Capaian Anggaran Sasaran ke-1	49
Tabel 3.11.	Tingkat Efisiensi Sasaran Ke-1	49
Tabel 3.12.	Target dan realisasi kinerja sasaran ke-2.....	51
Tabel 3.13.	Crocutting Sasaran Program Kegiatan.....	52
Tabel 3.14.	Crocutting Sasaran Program Kegiatan.....	54
Tabel 3.15.	Capaian Anggaran Sasaran ke-2.....	54
Tabel 3.16.	Tingkat Efisiensi Sasaran ke-2.....	54
Tabel 3.17.	Target dan realisasi kinerja tujuan ke-2.....	55
Tabel 3.18.	Target dan realisasi kinerja sasaran ke-3.....	56
Tabel 3.19.	Crocutting Sasaran Program Kegiatan.....	59
Tabel 3.20.	Capaian Anggaran Sasaran ke-3.....	59
Tabel 3.21.	Tingkat Efisiensi Sasaran ke-3.....	59
Tabel 3.22.	Target belanja Bappelitbangda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025	61
Tabel 3.23.	Formulir Evaluasi Hasil Renja, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Pelaksanaan 2025	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bapperida Kepulauan Selayar	4
Gambar 1.2. Pohon Kinerja Bapperida Kepulauan Selayar 2021-2026	4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan pembangunan.

Dalam laporan kinerja ini terkandung instrument yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dengan maksud mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan yang dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bapperida mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk

peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

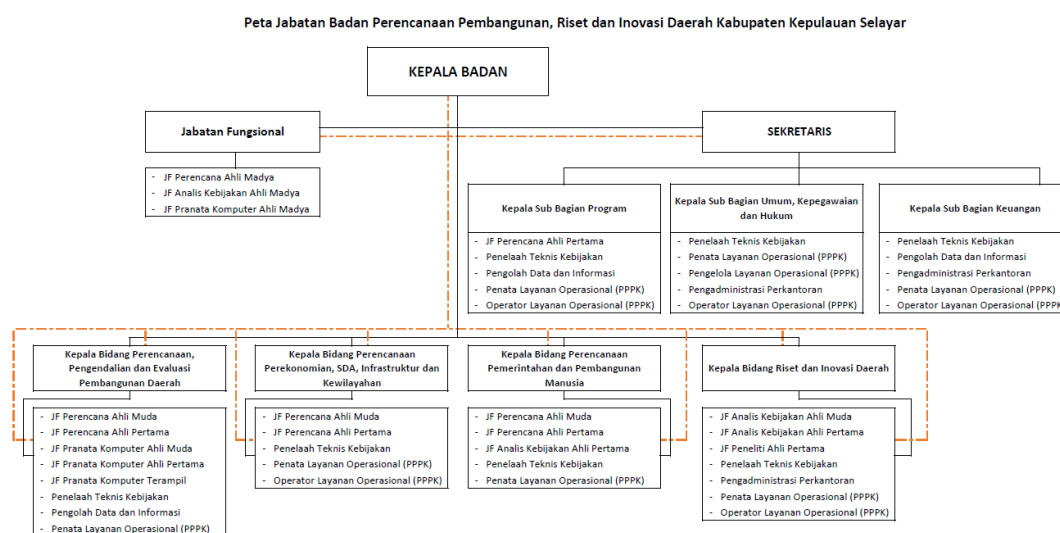
1.3.2. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
- 4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 6) Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Perencana Ahli;
 - b. Analis Kebijakan Ahli; dan
 - c. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

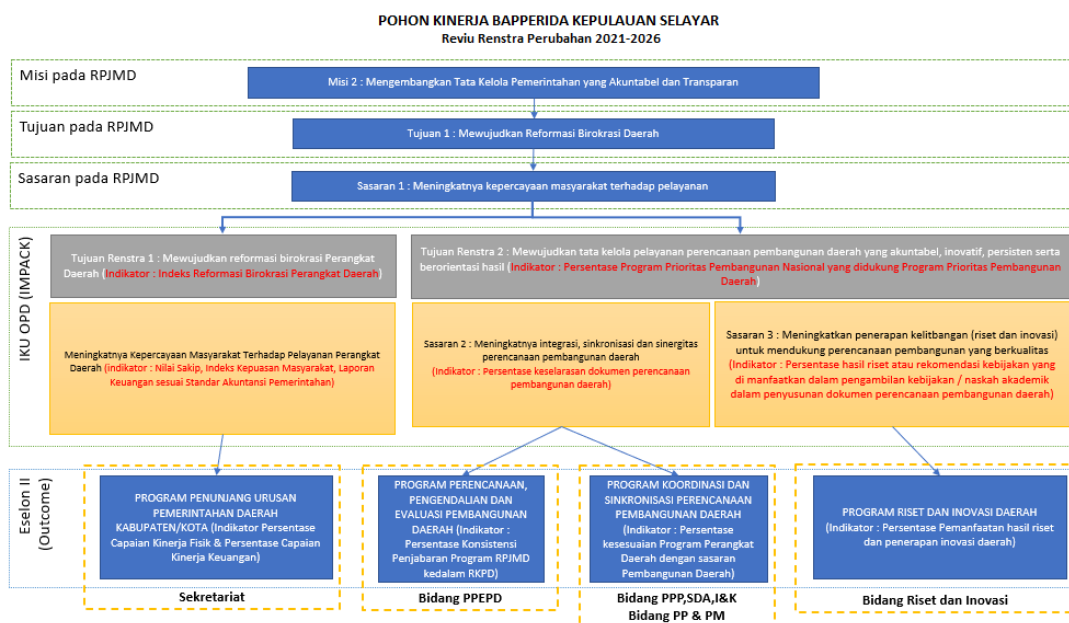
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bapperida Kepulauan Selayar



1.3.3. Cascading Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk agar dapat memberikan dukungan penuh dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2029. Adapun cascading kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Perubahan Cascading Kinerja Bapperida Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2026



1.3.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana Dan Anggaran

Berdasarkan data kepegawaian Bapperida Kepulauan Selayar per Desember 2025 terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 29 orang dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 31 orang, Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bapperida Kepulauan Selayar adalah sebanyak 60 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel. I.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Perguruan Tinggi	25	86,21%	41,67%	23	77,42%	40%
1	S3	2	6,90%	3,33%			
2	S2	10	34,48%	16,67%			
3	S1	13	44,83%	21,67%	23	74,19%	38,33%
4	D3	0	0,00%	0,00%	1	3,23%	1,67%
	Bukan Perguruan Tinggi	4	13,79%	6,67%	7	22,58%	11,67%
1	SMA	4	13,79%	6,67%	6	19,35%	10%
2	SMP				1	3,23%	1,67%
Jumlah		30			31		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		60					

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2025

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 29 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 9 pegawai (31%), golongan III sebanyak 18 pegawai (62%), dan golongan II sebanyak 2 pegawai (7%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel. I.2.
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2025

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	9	31%
	IV/c	1	3%
	IV/a	8	31%
2.	Golongan III	18	62%
	III / d	8	28%
	III / c	3	10%
	III / b	4	14%
	III / a	3	10%
3.	Golongan II	2	7%
	II / d	0	0%
	II / c	2	7%
	II / b	0	0%
	Jumlah	29	100%

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2025

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 29 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3,45%) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (17,24%) yang menduduki eselon III, 2 pegawai (6,90%) yang menduduki eselon IV, 10 pegawai (34,48%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 11 pegawai (37,93%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel. I.3.
Jumlah, Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3,45%
2	Eselon III	5	17,24%
3	Eselon IV	2	6,90%
4	Jabatan Fungsional Tertentu	10	34,48%
5	Jabatan Fungsional Umum	11	37,93%
	Jumlah	29	100%

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2025

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapperida dapat berjalan dengan baik, perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi aparatur Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkesinambungan, daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 1.4.
Jumlah Aset Bapperida Kep. Selayar
per Desember 2025

KODE ASET	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	1	2	3
03	ASET TETAP		
01	Tanah		-
	01 Tanah		
02	Peralatan Dan Mesin	352	3.222.406.144,00
	01 Alat Besar		
	02 Alat Angkutan	36	1.106.639.100,00
	03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2	16.651.550,00
	04 Alat Pertanian		-
	05 Alat Kantor Dan Rumah Tangga	173	868.479.345,00
	06 Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	17	178.869.200,00
	07 Alat Kedokteran Dan Kesehatan		-
	08 Alat Laboratorium	5	3.680.000,00
	09 Alat Persenjataan		
	10 Komputer	118	1.031.086.949,00
	11 Alat Eksplorasi		
	12 Alat Pengeboran		
	13 Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		20.000.000,00
	14 Alat Bantu Eksplorasi		
	15 Alat Keselamatan Kerja	1	4.000.000,00
	16 Alat Peraga		
	17 Peralatan Proses/Produksi		
	18 Rambu - Rambu		
	19 Peralatan Olah Raga		
03	Gedung Dan Bangunan	4	2.728.745.053,00
	01 Bangunan Gedung	4	2.728.745.053,00
	02 Monumen		
	03 Bangunan Menara		
	04 Tugu Titik Kontrol/Pasti		
04	Jalan, Jaringan Dan Irigasi		-
	01 Jalan Dan Jembatan		
	02 Bangunan Air		
	03 Instalasi		
	04 Jaringan		
05	Aset Tetap Lainnya	1	144.405.800,00
	01 Bahan Perpustakaan	1	144.405.800,00
	02 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
	03 Hewan		
	04 Biota Perairan		
	05 Tanaman		
	06 Barang Koleksi Non Budaya		
	07 Aset Tetap Dalam Renovasi		
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-
	01 Konstruksi Dalam Pengerjaan		

KODE ASET	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	1	2	3
05	Aset Lainnya	105	260.229.847,00
02	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		-
01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
03	Aset Tidak Berwujud		56.800.000,00
01	Aset Tidak Berwujud	2	56.800.000,00
04	Aset Lain-Lain		713.394.910,00
01	Aset Lain-Lain	103	713.394.910,00
05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(48.747.666,67)
01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(48.747.666,67)
06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(461.217.395,84)
01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(461.217.395,84)

Sumber : Bapperida Kab. Kepulauan Selayar 2025

Tabel. 1.5.
Perbandingan Dukungan Anggaran
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan Tahun 2025

Tahun	Jumlah
2021	Rp. 7.112.120.900
2022	Rp. 5.133.941.600
2023	Rp. 6.322.618.083
2024	Rp. 6.268.178.000
2025	Rp. 6.036.301.600

Sumber : Bapperida Kab. Kepulauan Selayar 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapperida berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp. 6.036.301.600, turun 3,69% dari tahun sebelumnya.

1.4. ISU - ISU STRATEGIS

Dalam penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, salah satu substansi dalam perencanaan adalah dengan perumusan masalah atau identifikasi masalah dilakukan terlebih dahulu yang kemudian ditindak lanjuti dengan perumusan isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, maka diformulasikan isu-isu strategis yang perlu

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.6
Rumusan Masalah dan Isu Strategis

Rumusan masalah	Isu Strategis
1) Keterbatasan data dan informasi, Data yang tidak valid, tidak mutakhir, atau tidak lengkap; 2) Inovasi teknologi, pemanfaatan teknologi modern, seperti aplikasi perencanaan berbasis GIS atau big data analisis; 3) Dinamika sosial dan politik, perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan	1) Pembangunan dan pengembangan platform berbasis teknologi informasi (GIS dan Big Data Analisis), dibutuhkan kolaborasi dengan perangkat daerah pengampu urusan/kewenangan; 2) Peningkatan kolaborasi antar stakeholder baik dari akademisi dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan Pembangunan

1.5. TINDAK LANJUT ATAS LHE SAKIP TAHUN 2024

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
A) Perencanaan Kinerja		
1.	Dokumen Perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik, dengan kondisi sebagai berikut : - Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan di capai di setiap level jabatan (Cascading). - Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Croscutting). Rekomendasi : Menyusun dokumen rencana aksi kinerja yang memuat penjelasan terkait rangkaian aktivitas untuk masing-masing sub kegiatan dan disertai dengan target yang terukur.	Bapperida telah Menyusun dokumen rencana aksi kinerja yang memuat rangkaian aktivitas pada subkegiatan berserta target yang akan dicapai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah dengan metode silajara
2.	Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dengan kondisi yang berikut : - Laporan monitoring dan evaluasi berkala belum	Dokumen perencanaan kinerja telah disempurnakan dengan memastikan antara indikator dengan target kinerja pada dokumen perencanaan telah sesuai dan selaras dengan

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
	<p>memberikan rekomendasi yang cukup dan spesifik untuk perbaikan dokumen perencanaan kinerja/aksi kinerja.</p> <p>Rekomendasi : Menyempurnakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja dengan memastikan kesesuaian/keselarasan indikator dan target kinerja pada setiap dokumen perencanaan.</p>	<p>menggunakan CRITICAL SUCCESS FACTOR (CSF) sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah.</p>
B) Pengukuran Kinerja		
1	<p>Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional; - Pengukuran kinerja belum memenuhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja; - Belum terdapat SOP yang mengakomodir perubahan jika terjadi kesalahan dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja. <p>Rekomendasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan; - Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional; - Menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja dengan penyesuaian kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja/perbaikan kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan telah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar - penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional masih didasarkan pada Anjab/ABK yang telah disusun bersama dengan perangkat daerah pengampu urusan. - Bapperida telah Menyusun Peraturan Kepala Badan yang memuat pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan tata cara pelaporan kinerja yang dilengkapi SOP pengumpulan data kinerja.
C) Pelaporan Kinerja		
1	<p>Dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi standar yang baik dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; 	<p>Bapperida telah Menyusun Peraturan Kepala Badan yang memuat pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan tata cara pelaporan kinerja yang dilengkapi SOP pengumpulan data kinerja.</p>

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
	<p>- Pelaporan kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.</p> <p>Rekomendasi : Menyempurnakan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja agar dapat memberikan rekomendasi yang cukup dan spesifik untuk perbaikan dokumen perencanaan kinerja/rencana aksi kinerja selanjutnya.</p>	

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar

Perumusan rencana strategis dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi misi yang telah ditetapkan dapat terwujud, Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (pilkada), kemudian disusunlah tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, Adapun tujuan, sasaran dan strategi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026
 Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1. Meningkatnya efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, penguatan system kelembagaan dan pengawasan, dan meningkatnya inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
Misi 2 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Perdesaan		
2. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan.	2. Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat perdesaan dan kualifikasi desa.
	3. Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian perdesaan.	3. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya local dalam rangka mengembangkan lapangan kerja dan lapangan usaha di perdesaan.
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		
3. Meningkatkan Fasilitas pembangunan sumber daya Manusia	4. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar masyarakat	4. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan Pendidikan dan Kesehatan
	5. Meningkatnya daya beli masyarakat	5. Meningkatkan pendapatan masyarakat
Misi 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
4. Mengoptimalkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia	6. Meningkatnya usaha perikanan	6. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana perikanan, penciptaan nilai tambah melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	7. Meningkatnya Usaha Pariwisata	7. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana kepariwisataan, daya Tarik destinasi, ekonomi kreatif, promosi, dan sumberdaya manusia pariwisata
	8. Meningkatnya usaha industry, transportasi dan perdagangan	8. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana pengembangan industry, peningkatan akses transportasi dan infrastruktur Pelabuhan, dan akselerasi perdagangan dalam dan luar wilayah melalui Kerjasama antar daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 5 : Meningkatnya Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan		
5. Meningkatnya aktualisasi nilai budaya	9. Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan local dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	9. Meningkatkan peran Lembaga sosial dan keagamaan dalam pembangunan manusia dan daerah
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	10. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	
Misi 6 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup		
7. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	11. Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026.

Melihat dari tabel 2.1 diatas, Bapperida mendukung pada pencapaian misi 1, tujuan 1, sasaran 1, Adapun sasarannya yaitu :
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Bapperida 2021-2026

Dari hasil telaahan, maka pokok-pokok perwujudan tujuan Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matriks Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB
			Nilai Sakip	B	B	BB	BB	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	C	B	B	B	B
			Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten serta berorientasi hasil	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	80%	85%	90%	95%	95%
			Persentase hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Perubahan Renstra Bapperida Kep. Selayar 2021-2026

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode 5 tahun, maka disusunlah strategi dan kebijakan Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar kurun waktu 2021-2026, adapun strategi dan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah (T1)	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (S1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik; 2. Meningkatkan Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapabilitas kelembagaan Perencana, koordinasi dan kompetensi SDM Perencana; 2. Meningkatkan akuntabilitas manajemen kinerja melalui keterbukaan informasi pelayanan publik; 3. Menerapkan pengelolaan sistem keuangan yang berbasis akrual sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan;
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten serta berorientasi hasil (T2)	<p>Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah (S2)</p> <p>Meningkatkan penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengoptimalan Koordinasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah melalui sistem informasi terintegrasi; 5. Pengoptimalan Koordinasi Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang Didukung Pengendalian dan Evaluasi serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan; 5. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan

	<p>perencanaan pembangunan yang berkualitas (S3).</p>	<p>6. Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai rekomendasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.</p>	<p>Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Lingkup (a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, (b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan (c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan”;</p> <p>6. Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian yang aplikatif sebagai materi naskah akademik atau dalam bentuk pengambilan kebijakan (Policy Brief) bagi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta, Infrastruktur dan Kewilayahan”.</p>
--	---	--	--

Sumber : Perubahan Renstra Bapperida Kep. Selayar 2021-2026

2.2. Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penetapan kinerja antara atasan dan bawahan, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran, disusun dan ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya dan tugas pokok serta fungsi yang dimiliki oleh individu atau organisasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Nomor : 100.3.6/12.a/II/2025 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2021-2026, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Bapperida Kep. Selayar Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
A	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten serta berorientasi hasil		Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah program prioritas pembangunan nasional yang didukung oleh program prioritas daerah $\times 100$
Jumlah program prioritas pembangunan nasional				
1.		Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD + Persentase kesesuaian Program Perangkat daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah $\times 100$
2.	Meningkatnya penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembanguna daerah	Jumlah hasil riset atau inovasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah $\times 100$	
				Jumlah riset atau inovasi yang dihasilkan

Sumber : Dokumen Perubahan IKU Bapperida Kep. Selayar

2.3. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahun 2025, Bapperida Kepulauan Selayar melaksanakan 4 Program, 16 kegiatan dan 69 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Crosscutting Sasaran Program dan Anggaran
DPA Perubahan tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase Anggaran	Ket
1	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 532.929.600	9%	Bapperida

No	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase Anggaran	Ket
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 357.195.100	6%	Bapperida
2	Meningkatkan penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Program Riset dan Inovasi Daerah	Rp. 353.965.500	6%	Bapperida
3	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp.4.792.111.200	79%	Bapperida

Sumber : DPA Bapperida Kep. Selayar Tahun 2025

Tabel 2.6
Rencana Kerja Bapperida Kep. Selayar Tahun 2025

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2025
5.01	PERENCANAAN			
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Persentase Capaian Kinerja Keuangan		4.792.111.200
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	16.940.200
5.01.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.308.600
5.01.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.454.800
5.01.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.454.800
5.01.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.689.600
5.01.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.689.600
5.01.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.482.000
5.01.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.860.800
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	3.411.008.300
5.01.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.391.999.300
5.01.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	11.407.600
5.01.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.999.800
5.01.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.601.600
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	100%	5.145.100

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2025
5.01.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.530.300
5.01.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.614.800
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya	100%	50.620.000
5.01.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	30.500.000
5.01.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	20.120.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan	100%	572.000.600
5.01.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	23.181.600
5.01.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.945.000
5.01.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	480.274.000
5.01.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	54.600.000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	107.879.100
5.01.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	
5.01.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	
5.01.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	56.000.000
5.01.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	51.879.100
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	287.012.900
5.01.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	27.872.000
5.01.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	259.140.900
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	341.505.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2025
5.01.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	172.370.000
5.01.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	2.960.000
5.01.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.210.000
5.01.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	4.000.000
5.01.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	138.985.000
5.01.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	10.980.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	95%	532.929.600
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	95%	324.332.900
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	18.779.900
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	20.181.000
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	7.271.700
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	25.571.700
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	440 Usulan	6.615.000
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	245.914.200
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%	21.786.900
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	7.612.500
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	28 Orang	5.956.200
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	8.218.200
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan	100%	186.809.800
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	9.128.400

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2025
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	177.681.400
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	95%	357.195.100
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	95%	170.510.500
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	15.000.000
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	15.287.700
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	15.034.000
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	419.700
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	10.000.000
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	45.492.000
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	69.277.100
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	95%	68.329.300
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	5.328.000
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	3.565.200

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2025
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	14.868.000
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	7.297.300
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	4.932.400
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	2.370.000
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	24.721.700
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	5.246.700
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95%	118.355.300
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	6.000.000
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	3.843.500
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	35.817.000
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	12.911.000
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	5.458.000
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11 Laporan	3.591.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2025
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	45.099.800
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	5.635.000
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Penerapan Inovasi Daerah	100%	353.965.500
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Persentase Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian yang di manfaatkan	100%	346.000.200
5.05.03.2.01.0002	Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Jumlah Naskah Kebijakan Berbasis Hasil Riset	1 Naskah	153.339.100
5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	5 Laporan	38.361.100
5.05.03.2.01.0006	Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dalam bentuk Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah	1 Dokumen	154.300.000
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	100%	7.965.300
5.05.03.2.02. 0012	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	1 Laporan	7.965.300
JUMLAH				6.036.201.400

Sumber : DPA Perubahan Bapperida Tahun Anggaran 2025

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Bapperida Kep Selayar Tahun Anggaran 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten serta berorientasi hasil		Persentase program prioritas pembangunan nasional yang didukung oleh program prioritas pembangunan daerah	100%
		Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	95%
		Meningkatkan penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil riset atau kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%
3	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	B
			Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bapperida Kep Selayar

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan tanggung jawab suatu organisasi atau individu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan atas penggunaan anggaran, sesuai dengan perencanaan yang dibuat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau Masyarakat.

Bapperida Kepulauan Selayar melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang telah diperjanjikan Kepala Bapperida dengan Bupati Kepulauan Selayar tahun 2025. Dengan perhitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Realisasi Target Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau Muda
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning Tua
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Implementasi dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kepulauan Selayar Nomor : 100.3.6/12.a/II/2025 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2026 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian IKU Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan Pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten, serta berorientasi hasil	Persentase program prioritas Pembangunan nasional yang didukung oleh program prioritas Pembangunan daerah	%	100	100	100
2	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	%	95	100	105,26
3	Meningkatkan penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100

Sumber : Bapperida Kep Selayar Tahun 2025

Adapun tujuan, sasaran, indikator dan capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kode
1	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan Pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten, serta berorientasi hasil		Persentase program prioritas Pembangunan nasional yang didukung oleh program prioritas Pembangunan daerah	%	100	100	100	
2		Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	%	95	100	105	
3		Meningkatkan penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	
4	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	BB	N/A	N/A	
		Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai	BB (70.10)	BB (72.95)	104.07	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (76.61)	B (83.35)	108.8	
5			Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	Opini	Sesuai	N/A	N/A	

Sumber : Bapperida Kep Selayar Tahun 2025

* Capaian Tahun 2024

Bapperida Kepulauan Selayar memiliki 1 (satu) indikator tujuan dan 5 (lima) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis. Pada tahun 2025, persentase capaian sebesar 103.57% dengan 1 Indikator sasaran hasil pengukuran tahun sebelumnya.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta Indikator-Indikator Kinerja Bapperida Tahun 2025 :

3.2.1 Pengukuran Capaian Tujuan ke -1

Tujuan ke-1 ini menjadi indikator impack yang berfokus pada sinergi antara pusat dan daerah guna mendukung dan berkontribusi langsung pada pencapaian target Pembangunan nasional, baik dalam hal pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas Pendidikan atau Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Indikator ini di topang oleh 2 (dua) Indikator Sasaran.

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, konsisten serta berorientasi hasil

Indikator : Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah

Target dan Realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi kinerja tujuan ke-1

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2024)	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bapperida Kep Selayar 2025

➤ Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator Tujuan ke-1

Indikator Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana program-program prioritas yang ditetapkan di tingkat nasional

mendapat dukungan dan implementasi di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota), dihitung dengan membandingkan jumlah program nasional yang diadopsi oleh daerah dengan jumlah total program prioritas nasional. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan bersama. Indikator ini penting untuk memastikan adanya sinergi antara kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.5
Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung
Prioritas Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Program Penguatan Fiskal Daerah	15 Program	
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Program Penguatan Pendidikan Gratis PAUD-PT	4 Program	
		Program Kesetaraan Gender, PPA, dan Penyandang Disabilitas	3 Program	
3	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Program Pelayanan Kesehatan Gratis dengan BPJS	1 Program	
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Program Pemerataan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan UMKM	3 Program	
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Proram Hilirisasi Sumber Daya Alam Berbasis UMKM	9 Program	
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Huluisasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Berbasis Potensi Unggulan Lokal	3 Program	
		Program Pengentasan Kemiskinan	7 Program	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
7	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Bebas RTLH		
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Program Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi Daerah	3 Program	
		Program Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pembauran Kebangsaan	3 Program	
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Program Kemandirian Pangan	9 Program	
10	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Hulusasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Berbasis Potensi Unggulan Lokal		
11	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Program Membangun Desa, Menata Kota	5 Program	
12	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Program Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Program	
13	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 Program	
J U M L A H			76 Program	

Sumber : RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025

Pernyataan pada tabel 3.5 diatas dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 halaman 116 dan tabel 4.8 di bawah (pengukuran capaian sasaran ke – 2).

3.2.1.A. Pengukuran Capaian Sasaran ke - 1

Sasaran ke-1 ini berfokus pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan indikator sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah

Indikator : Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-1

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2024)	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	111,11	95	100	105	95	105

Sumber Bapperida Kep Selayar 2025

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator sasaran ke-1**

Indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan dokumen turunannya, saling terintegrasi serta selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi, tujuannya agar 1) efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan dalam pencapaian target pembangunan meningkat, 2) tumpang tindih kebijakan atau program antar perangkat daerah dapat dihindari, sehingga pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran. 3) perencanaan yang berbasis data dan bukti untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta berjalan lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja sasaran (intermediate outcome) satu didukung dengan 2 (dua) Program (indikator outcome), yakni 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

dan 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.7
Croscutting Sasaran Program

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Program	Indikator	target	Capaian
Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	95	100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	95	100
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	95	100

Penjelasan Capaian Indikator Program (Outcome)

➤ ***Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah*** dengan indikator kinerja Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, Indikator ini menunjukkan seberapa baik program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program RPJMD yang tercantum dalam RKPD dan jumlah program RPJMD yang seharusnya ada dalam RKPD. Persentase konsistensi penjabaran program dalam RKPD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerjemahkan RPJMD dengan baik dan konsisten.

1. Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029, terdapat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) program perencanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 terdapat 288 (dua ratus puluh sembilan) program pernyataan tersebut dapat dilihat pada pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun

2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 halaman 57

2. Kesesuaian program RKPD dan APBD.

Dari 209 program yang terdapat pada RKPD Tahun 2025, terdapat 6 atau 2,87 persen program dengan capaian tinggi, sebanyak 25 program atau 11,96 persen dengan capaian sedang, dan sebanyak 178 program atau 85,17 persen dengan capaian rendah;

3. Kesesuaian program RPJMD dan APBD.

Dari 288 program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, hanya 209 program yang di anggarkan pada APBD Tahun 2025, terdapat 79 program yang tidak dianggarkan pada APBD.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, didukung dengan kegiatan 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan memonitoring pencapaian indikator kinerja program ini, diantaranya adalah :

1. Penyusunan dan Penetapan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik Dokumen RKPD Tahun 2025;
3. Fasilitasi Pelaksanaan Musrembang Kecamatan dan Pelaksanaan Musrembang RKPD Tahun 2025;
4. Verifikasi Usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2025;
5. Rapat Komisi di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD Tahun 2025) pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi-Selatan;
7. Penyusunan dan Penetapan Dokumen RKPD Tahun 2026;
8. Penyusunan dan Penetapan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025;
9. Pendampingan pelaksanaan e-planning (proses perencanaan dan penganggaran dan pelaporan) melalui aplikasi terpusat yang disediakan kemendagri yakni SIPD;

10. Penyusunan Buku Profil Pembangunan Tahun 2024;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala pengendalian pembangunan berbasis web (e-manca)

➤ **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah, indikator ini mengukur sejauh mana program prioritas yang diterapkan oleh perangkat daerah sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program prioritas perangkat daerah yang sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan jumlah total program prioritas perangkat daerah. Semakin tinggi persentase kesesuaian, maka semakin baik program prioritas perangkat daerah mewujudkan sasaran prioritas pembangunan daerah. Ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Indikator ini juga membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengevaluasi kinerja program prioritas perangkat daerah dan memastikan bahwa program pembangunan daerah selaras dengan sasaran prioritas pembangunan daerah.

Perumusan program prioritas tahun 2025 mengacu pada tema pembangunan RKP Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi : Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, penjelasan keterkaitan

antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah seperti tertuang pada dokumen RKPD tahun 2025 halaman 116 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2025

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan melalui penerapan nilai budaya dan kearifan lokal								
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	90,02	100	56.965.140.206	Disdikpora
				Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	110,97	100		
				Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	94,44	100		
		2	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasiltasi	Persen	40,74	45,50	536.000.000	Dinsos
		3	Program rehabilitasi sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	1.939.000.000	Dinsos
				Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100		
Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen			100	100				

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	40,54	25,92		
		4	Program penanganan bencana	Persen	100	100	200.500.000	Dinsos
		5	Program pengembangan perumahan	Persen	98	100	638.393.864	DPKP
			Persentase Warga Negara yang memperoleh rumah layak huni	Persen	-	100		
		6	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persen	51,47	54,55	154.423.000	Distan KP
		7	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persen	69,42	80,35	5.293.788.200	DP3AP2KB
		8	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Angka	36/1000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	6.821.500.000	Dinkes
		9	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (SPM)	Persen	78,34	100	113.873.679.800	Dinkes
			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	75,88	100		
			Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	79,41	100		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
			Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	64,37	100			
			Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	85,90	100			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100			
			Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100			
			Persentase Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	100	100			
			Persentase Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	60,65	100			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	70,85	100			
			Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Kategori	Utama	Utama			
2	Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	1	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau	Persen	68,42	100	582,295.300	Disdag KUKM

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
		2	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	Persen	100	100	10.496.200	Disdag KUKM
3	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	1	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Persen	100	100	90.000.000	Kesbangpol
		2	Program pengembangan kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Persen	0	100	250.000.000	Disparbud
		3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	Persen	0	0	357.118.650	Semua Kecamatan
4	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	1	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	Persen	0,39	1	258.923.500	Semua Kecamatan
		2	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Persen	100	100	90.000.000	Kesbangpol
5	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	4,50	4,60	317.318.200	DPK
		2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	67	70	7.195.000.000	Disdikpora
		3	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	Persen	30,19	20,00	200.000.000	Dinkes
2	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif								
1	Meningkatnya kepercayaan	1	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persen	100	100	452.719.050	Diskominfo SP

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
	masyarakat terhdap pelayanan	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100	100	2.561.500.000	Setda
				Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	99,27	100		
		3	Program kepegawaian daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persen	82,16	99,80	772.049.800	BKPSDM
				Persentase ASN yang berkinerja baik	Persen	99,78	100		
		4	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Menit	19,09	10	169.102.700	Semua Kecamatan
		5	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	95	1.000.000.000	Bapperida
		6	Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,002	3+	4.084.144.341	Inspektorat Daerah
		7	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	3,68	4,50	135.365.873.000	BPKPD
		8	Program pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan KTP-el	Persen	99,27	100	91.540.000	Disdukcapil
				Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	54,08	37		
9	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (SPM)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	95,00	100	828.028.300	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100	100				
10	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	0,90	0,27	359.999.550	DP3AP2KB		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
		11	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	Persen	100	100	667.796.650	Diskominfo SP
		12	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	Persen	100	95	700.000.000	Bapperida
		13	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	903.000.000	Bapperida
		14	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD	Persen	100	100	10.327.753.600	Setwan
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	Persen	100	100	441.000.000	DisPMD
3	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan								
1	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	57,26	74,09	39.194.698.116	DisPUTR
				Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	Persen	0	90		
				Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	Persen	96,25	99,50		
		2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian	Persen	100	100	1.416.542.500	Distan KP
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS Kewenangan Kabupaten	Persen	100	95	10.054.378.887	DisPUTR
				Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	100	50		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
			Persentase Luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaen Kota yang di layani oleh jaringan irigasi	Persen	3,91	1,98		
		2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPM)	Persen	76	100	5.000.000.000	DisPUTR
		3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (SPM)	Persen	100	100	4.600.000.000	DisPUTR
		4	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persen	1,03	8,27	3.020.000.000	DPKP
3	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	1	Program pengelolaan pelayaran	Persen	44,07	70,50	670.000.000	Dishub
		2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persen	37,92	30,92	295.000.000	Dishub
4	Peningkatan ekonomi desa							
1	Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekomian Perdesaan	1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persen	2,63	3,42	617.114.000	Disperin TK
		2	Program penempatan tenaga kerja	Persen	27,55	39,69	206.622.100	Disperin TK
		3	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persen	55,00	100	700.037.100	Disdag KUKM
		4	Program penyuluhan pertanian	Persen	17,14	29,82	36.462.000	Distan KP

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
		5	Program kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	Persen	6,32	5,27	1.115.575.983	DPKP
		6	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)			881.500.000	DP3AP2KB	
	BKB			Persen	29,18	0,74			
	BKR			Persen	2,71	0,61			
	BKL			Persen	40,01	0,62			
	PIK R			Persen	73,03	0,51			
	UPPKS			Persen	43,19	0,91			
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	Persen	33,33	33,33	470.000.000	DisPMD
		2	Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	Persen	8,6	3,46	30.000.000	DisPMD
		3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	99,00	100	7.987.652.026	Semua Kecamatan
5	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah								
1	Meningkatnya usaha perikanan	1	Program promosi penanaman modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	1,878	32	130.000.000	DPMPPTSP
		2	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	24.962,90	27.519,34	780.962.800	Disper
		3	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	468,44	1.230,39	419.267.800	Disper
		4	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	99,98	100	1.293.635.400	Setda

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
		5	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	244,91	249,84	1.579.635.400	Disper
		6	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	Persen	0	60	52.481.000	Disperin TK
2	Meningkatnya usaha pariwisata	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	3,39	8	400.000.000	Disparbud
		2	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-16,41	5	735.000.000	Disparbud
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar	Persen	-22,85	10		
				Tingkat huniaan akomodasi	Persen	4,20	10,00		
		3	Program pengelolaan penerbangan	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	Persen	0	100	5.125.150	Dishub
		4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	Persen	100	100	300.000.000	Disparbud
		5	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Persen	100	100	159.598.000	Disdag KUKM
		6	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	Persen	20,58	23,00	240.518.100	Disdag KUKM
7	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Persen	0	20	3.295.953.500	Disperin TK		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
3	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	1	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	76,286	74,5	584.789.000	DPMPPTSP
		2	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	15.000.000	DPMPPTSP
6	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana								
1	Menurunnya tingkat perusakan lingkunngan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Angka	2,01	2,59	175.912.600	DLH
		2	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	1,40	1,38	586.491.000	DLH
		3	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	Persen	51,20	68	64.537.000	DLH
		4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	Persen	0	100	0	Dis PUTR
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	5	Program penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	894.500.000	BPBD
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100		
		6	Program pengelolaan persampahan	Persen	1,66	1,30	3.516.725.000	DLH
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	7	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (SPM)	Persen	100	100	275.000.000	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
			Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran	Menit	11,84	10,30		

Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2023, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Tabel 3.5 diatas menunjukkan keselarasan terkait indikator kinerja 76 (tujuh puluh enam) program prioritas perangkat daerah dengan 16 (enam belas) sasaran prioritas pembangunan daerah. sedangkan keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah diuraikan pada tabel 3.5 di atas.

Pernyataan pada tabel 3.5 dan tabel 3.8 diatas dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 halaman 114.

Harmonisasi dan Sinkronisasi pencapaian tersebut di atas dicapai melalui fasilitasi pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pada masing-masing bidang perencanaan Pembangunan diantaranya :

- a) Bidang Pemerintahan yakni : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem, koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data P3KE serta pemantuan capaian pelaksanaan SDGs;
- b) Bidang Pembangunan manusia diantaranya fasilitasi pendampingan penurunan angka stunting (rembuk stunting, manajemen data stunting, reviu program kegiatan penurunan angka stunting), pengembangan regulasi anak putus sekolah (pengembangan rencana aksi daerah dan memastikan anggaran berbasis sektor), kesetaraan gender, Kabupaten Layak Anak (KLA), serta teviu terhadap capaian indikator kabupaten sehat;
- c) Bidang perekonomian diantaranya fasilitasi pendampingan Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Selatan;
- d) Bidang Sumber Daya Alam diantaranya fasilitasi pendampingan Pamsimas (penyediaan air minum berbasis masyarakat), Sanimas (sanitasi berbasis masyarakat), dan Penyusunan KLHS RPJPD Selayar 2025-2045;
- e) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan diantaranya fasilitasi pendampingan Penyusunan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar dan pendampingan Pisew (Penyelenggaraan Infrastruktur Ekonomi Wilayah).

❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2026**

Melihat dari keterkaitan target dan capaian akhir tujuan dan sasaran strategis terkait capaian indikator tujuan ke-1, sasaran ke-2, maka dapat dilihat bahwasanya tahun keempat rencana startegis telah mencapai target yang ingin diraih.

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensi**

Sesuai penjabaran sebelumnya, bahwa indikator Sasaran Strategis Pertama ini didukung oleh **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan** dan **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan**

Daerah yang terdapat di tiga Bidang yakni Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Tabel 3.9
Corscutting Sasaran Program Kegiatan

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Prioritas)
	a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Anggaran Sasaran ke-1

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Rp. 890.124.700	Rp.858.387.131	96.43%

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-1

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	105,26	96,43	91.61	109	Sangat Efisien

Dari kedua tabel diatas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.858.387.131 atau 96,43% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 105,26%. Dengan

membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-1 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 91,61%.

❖ Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah :

a. Pendukung :

- Terjalannya koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan;
- Konsistensi dalam implementasi program kegiatan;
- Sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelibangda.

b. Permasalahan :

- Dinamisnya perubahan peraturan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan, hal ini berdampak pada tingkat konsistensi indikator kinerja dokumen perencanaan daerah dengan indikator kinerja dokumen perencanaan OPD pelaksana;
- Belum Optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengumpulan dan Validasi data capaian indikator kinerja daerah (SPM, LPPD, dan SDGs) dari OPD Pelaksana yang terbagi dalam Bidang Infrastruktur, Bidang SDA, Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Bidang Pemerintahan Kewilayahan, hal ini berdampak pada lambatnya penyusunan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya pada Bab II yang memuat gambaran umum kondisi daerah.

c. Solusi

- Pengoptimalan penyediaan data/informasi yang berkualitas dan pengoptimalan hasil kajian penelitian dan pengembangan;
- Peningkatan fungsi kelembagaan, kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

3.2.1.A Pengukuran Capaian Sasaran ke - 2

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke-2 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang berfokus pada Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas

Indikator : Persentase hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12
Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-2

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2024)	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029
			Target	Realisasi	Capaian		
2.	Persentase hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100

➤ Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator sasaran ke-2

- ❖ Indikator Persentase hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerahk, Indikator ini mengukur sejauh mana hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, program, atau naskah akademik. Indikator ini menunjukkan tingkat integrasi hasil riset ke dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen strategis, tujuannya adalah 1) Memastikan pengambilan keputusan didasarkan pada penelitian yang valid dan rekomendasi yang relevan, 2) Meminimalkan risiko kebijakan yang tidak tepat sasaran. 3) Mendukung Peningkatan Kualitas Naskah Akademik yang kuat secara substansi dan berdasar pada riset

yang komprehensif. Dampaknya Kebijakan yang Lebih Responsif/Relevan dan Akurat akan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan, mendorong sinergi dengan perguruan tinggi dan riset untuk mencegah tumpang tindih riset yang tidak terpakai atau tidak relevan, Indikator Kinerja sasaran dua didukung 1 (satu) Program, yakni Program Riset dan Inovasi Daerah.

Tabel 3.13
Crosscutting Sasaran Program

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Program	Indikator	target	Capaian
Meningkatkan penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	100	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Penerapan Inovasi Daerah	100	100

Penjelasan Capaian Indikator Program

➤ Program Riset dan Inovasi Daerah dengan indikator kinerja kunci program yaitu Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Penerapan Inovasi Daerah, indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil penelitian dan pengembangan (kelitbangan) serta inovasi yang dihasilkan telah dimanfaatkan atau diterapkan dalam kebijakan, program, kegiatan pembangunan, atau layanan publik di daerah, memastikan bahwa hasil riset dan inovasi benar-benar diterapkan secara nyata, sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun 2025 dalam mendukung kesempurnaan dokumen perencanaan Pembangunan daerah, diantaranya :

1. Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
2. "Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan"
3. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
4. "Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi"

Tahun 2025, Bapperida Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa kegiatan kelitbangan dan riset daerah, 5 (lima) diantaranya akan dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah pada penyusunan naskah akademik atau penyusunan Rancangan Awal (Teknokratik) dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, penyusunan Rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 dan penyusunan Rancangan Akhir dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Adapun judul dari 5 kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan Ranwal tersebut yaitu :

1. Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah 2025-2029;
2. Pengukuran/Survei Indeks Kesalehan Sosial (Amanat RPJMD);
3. Fasilitasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah;
4. Fasilitasi Pendampingan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
5. Fasilitasi Pendampingan Pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

Adapun kegiatan dan fasilitasi penelitian, pengkajian dan pengembangan tahun 2025 diantaranya :

1. Fasilitasi Pengukuran indeks daya saing daerah Tahun 2025;
2. Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Penginputan Indeks Inovasi Daerah;
4. Penyusunan Dokumen Inovasi untuk Penghargaan Pembangunan Daerah dan SDGs;
5. Penyusunan Policy Brief;

❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2029**

Melihat dari keterkaitan target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator sasaran ke-2, maka dapat dilihat bahwasanya tahun pertama renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 100%

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensi**

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran Kedua ini didukung oleh **Program Riset dan Inovasi Daerah** yang terdapat di Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Tabel 3.14
Crosscutting Sasaran Program dan Kegiatan

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatkan penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Program Riset dan Inovasi Daerah
	a. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan
	b. Inovasi dan Inovasi

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15
Capaian Anggaran Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas (S2)	Rp. 353.965.500	Rp.349.266.253	98,67%

Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
Meningkatkan penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas (S2)	100	98,67	98.67	101	Efisien

Dari kedua tabel diatas, realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.349.266.253 atau 98.67% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-2 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 98.67%.

- ❖ Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah :
 - a. Pendukung :
 - Koordinasi yang baik antara Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Stakeholder terkait dalam meningkatkan inovasi daerah guna mendukung inovasi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. Permasalahan :
 - Penyediaan data base kelitbangan yang akurat dan up to date guna mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan pengambilan kebijakan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan strategis;
 - c. Solusi
 - Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama guna mendorong pengembangan database penelitian dan inovasi daerah yang berbiaya murah.

3.2.2 Pengukuran Capaian Tujuan ke -2

Tujuan ke-2 ini menjadi indikator impact yang berfokus pada upaya sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja, efisiensi, dan efektivitas aparatur negara dalam melayani masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikator ini di topang oleh 3 (tiga) Indikator Sasaran.

Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Target dan Realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17
Target dan Realisasi kinerja tujuan ke-2

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2024)	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	59,52 (CC)	BB	N/A	N/A	BB	BB

Sumber Bapperida Kep Selayar 2025

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator Tujuan ke-2**

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah instrumen yang digunakan untuk menilai sejauh mana reformasi birokrasi diimplementasikan di tingkat pemerintah daerah. Penilaian ini bertujuan untuk mendorong perbaikan dalam hal efisiensi administrasi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi 59,52 (CC). Namun sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja tujuan dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025, disebabkan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 belum dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu urusan/kewenangan.

3.2.2.A Pengukuran Capaian Sasaran ke - 3

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke-3 mempunyai 3 (tiga) inikator kinerja. Sasaran ke-3 ini menjadi sasaran yang berfokus pada Bidang Sekretariat, dengan indikatornya adalah sebagai berikut

Sasaran	: Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah
Indikator	: 1. Nilai Sakip 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.18
Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-3

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2024)	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Nilai Lakip	BB (70,10)	BB (70)	BB (72,95)	121.6	BB (82)	BB (70)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,11)	B (82)	B (83,35)	98	B (82)	B (82)
3.	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	N/A	Sesuai	N/A	N/A	Sesuai	N/A

*Capaian kinerja Tahun 2025

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-3**

- ❖ Tabel 3.18 diatas menunjukkan realisasi kinerja indikator sasaran ke-3 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **Nilai Sakip sebesar 121,6%**.

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran dengan indikator kinerja **Nilai Sakip** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025, disebabkan pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2025 belum dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu urusan/kewenangan. Adapun target yang ingin dicapai oleh Bapperida Kepulauan Selayar tahun 2025 mendapat nilai BB (72.95).

Namun demikian, dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian SAKIP Bapperida Nomor : 700.1.2.7/086/EV-LAKIP/III/2025/ITDA tanggal 24 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, bahwasanya Bappelitbangda memperoleh nilai sebesar 72,95 dengan kategori BB (Sangat Baik), dengan demikian Bapperida akan terus bekerja lebih giat agar dapat terus meningkatkan nilai Sakip yang diperoleh.

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-4**

- ❖ Tabel 3.18 diatas menunjukkan realisasi kinerja indikator sasaran ke-4 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat** dengan nilai B atau 98.

Berdasarkan data laporan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Bidang Riset dan Inovasi Daerah, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeirda) Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan adalah baik. Nilai rata-rata keseluruhan unsur layanan adalah 83,35 dalam skala 100. Namun, terdapat beberapa unsur layanan yang perlu diperbaiki, yaitu waktu penyelesaian, perilaku pelaksana, serta penanganan pengaduan pengguna layanan.

Beberapa rekomendasi terhadap perbaikan diantaranya penerapan sistem pelayanan secara online, penyediaan sarana

dan prasarana yang memadai, termasuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana secara berkala, serta penerapan system pengaduan secara online.

Untuk itu Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar berkomitmen meningkatkan pelayanan dengan menerapkan sistem berbasis online.

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-5**

- ❖ Tabel 3.18 diatas menunjukkan realisasi kinerja indikator sasaran ke-5 dengan indikator kinerja sasaran yaitu sesuai.

Namun sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran dengan indikator kinerja **Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025, disebabkan penilaiannya belum dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu urusan/kewenangan.

- ❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2029**

- a. Pada sasaran ke-3 Indikator ke-1 yaitu **Nilai Sakip**, maka dapat dilihat bahwasanya realisasi tahun kedua Renstra mendapat nilai Sakip 72.95 atau Predikat BB dengan Capaian 121,6%. jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 70 atau predikat BB, Bapperida telah mencapai target tahun terakhir renstra, Bapperida akan terus berupaya dan berkomitmen dalam meningkatkan Nilai SAKIP menjadi lebih baik lagi;
- b. Pada sasaran ke-3, Indikator 2 yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat**, maka dapat dilihat bahwasanya Realisasi tahun keempat Renstra dengan nilai B atau 83.35 dengan capaian 98%, maka dapat dilihat bahwasanya tahun keempat renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 82%, akan tetapi Bapperida akan terus berupaya dan berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan dengan berbasis online.
- c. Pada sasaran ke-3, Indikator 3 yaitu **Laporan Keuangan sesuai standar Akuntansi Pemerintahan** merupakan indikator baru yang masuk pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta penilaian akan laporan keuangan

2025 baru akan dilakukan pada tahun 2026 oleh perangkat daerah pengampu kewenangan.

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensi**

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran Ketiga ini didukung oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Tabel 3.19
Crosscutting Sasaran Program dan Kegiatan

Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif dan berkelanjutan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Nilai Sakip	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat	b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		b. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20
Capaian Anggaran Sasaran ke-3

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Rp.4.792.111.200	Rp.4.606.497.250	96.13%

Tabel 3.21
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-3

Indikator Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
1. Nilai Sakip	100	84	79,63	126	Sangat Efisien
2. Indeks Kepuasan Masyarakat	100	99	98,97	101	Sangat Efisien
3. Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	n.a	96	90,74	110	Sangat Efisien
Rata-rata Capaian Kinerja	100	93	89,78	112,33	Sangat Efisien

* capaian Kinerja tahun 2024

Dari kedua tabel diatas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.4.606.497.250 atau 96,13% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-3 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 89,78%, seperti yang digambarkan pada tabel 3.21.

❖ Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah :

d. Pendukung :

- Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam lingkup kerja Bapperida Kepulauan Selayar;
- Sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai;
- Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja.

e. Permasalahan :

- Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.

f. Solusi

- Peran aktif pejabat struktural dalam mengawal program dan kegiatan baik dari kinerja maupun anggaran;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran hal ini dilakukan agar pencapaian target kinerja dapat dicapai;
- Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan teknis.

3.3. REALISASI KEUANGAN

Anggaran menjadi faktor pendukung dan berpengaruh dalam rangka mencapai indikator keberhasilan. Program dan kegiatan juga dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai, dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan target belanja setelah APBD perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.036.201.400 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.22
Target belanja Bapperida APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp.5.916.343.300	98.01%
1.1	Gaji Pokok PNS	Rp. 3.391.999.300	56,19%
1.2	Belanja Barang Jasa	Rp. 2.524.344.000	41,82%
2	Belanja Modal	Rp. 119.858.100	1,99%
2.1	Belanja Modal Mebel	Rp. 9.266.000	0,15%
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 66.500.000	1,10%
2.3	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 44.092.100	0,73%

A. Belanja Operasi

Belanja Operasional Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.5.916.343.300,- dan terealisasi sebesar Rp.5.712.081.285,- atau 96,55%.

B. Belanja Modal

Belanja Modal Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.119.858.100,- dan terealisasi sebesar Rp.102.069.349,- atau 85,16%

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi kinerja keuangan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.23

Formulir Evaluasi Hasil Renja, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Pelaksanaan 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)						
						7			8		9		10		11		12			13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah			Nilai Sakip (Indeks)	BB	22.536.459.390	BB	4.252.305.591	BB	4.792.111.200	15	55.134.211	3	109.811.513	3	75.877.611	7	127.269.865	BB	368.093.200	BB	4.620.398.791	BB			
				Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (Status)	Sesuai		Sesuai		Sesuai																	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Indeks)	B		B		B																	
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	22.536.459.390	0,00	4.252.305.591	72,31	4.792.111.200	93%	985.015.045	23%	1.547.605.829	37%	712.111.338	18%	1.326.765.038	100%	4.607.497.250	100%	8.859.802.841				
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	95,00		0,00		91,00										0							
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu (%)	100,00	171.500.001	34,69	12.638.100	100,00	15.911.600	36,90%	0	22,62%	2.479.534	36,90%	4.940.351	17,86%	5.917.687	114%	13.337.572	100%	25.975.672	69,39%	15,15%		
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	27.500.000	3	1.898.400	3	3.343.600	1	0	1	1.780.834	1	1.191.416	0	0	3	2.972.250	6	4.870.650	85,71%	17,71%		
		5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	19.000.001	2	1.138.400	1	1.454.800	0	0	1	0	0	1.188.799	0	152.600	1	1.341.399	3	2.479.799	60,00%	13,05%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)						
								I		II		III		IV										
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
				Dokumen RKA-SKPD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	19.000.00 0	1	1.142.80 0	1	1.454.80 0	0	0	0	0	1	0	0	1.341.285	1	1.341.285	2	2.484.085	40,00 %	13,07 %
		5.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	25.000.00 0	1	1.140.60 0	1	1.689.60 0	1	0	0	698.700	0	0	0	894.172	1	1.592.872	3	2.733.472	60,00 %	10,93 %
		5.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	25.000.00 0	1	1.026.30 0	1	1.689.60 0	0	0	0	0	0	1	1.613.985	1	1.613.985	2	2.640.285	40,00 %	10,56 %	
		5.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	41.000.00 0	3	3.475.60 0	3	3.562.40 0	3	0	0	0	0	2.560.136	0	746.200	3	3.306.336	6	6.781.936	40,00 %	16,54 %
		5.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	15.000.00 0	4	2.816.00 0	4	2.716.80 0	1	0	1	0	1	0	1	1.169.445	4	1.169.445	8	3.985.445	160,00 %	26,37 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)						
								I		II		III		IV				13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		5.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100, 00	15.758.17 3.684	34,8 4	3.190.20 4.565	100, 00	3.411.00 8.300	43,7 5%	822.172. 677	0,00 %	1.163.890 .850	0,00 %	483.784. 694	0,00 %	787.760.6 80	100 %	3.257.60 8.901	100 %	6.447.813 .466	45,46 %	40,92 %
		5.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155	15.563.67 3.684	30	3.173.87 4.965	31	3.391.99 9.300	31	822.172. 677	0	1.152.913 .447	0	483.097. 782	0	782.001.2 85	31	3.240.18 5.191	61	6.414.060 .156	39,35 %	41,21 %
		5.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120	100.000.0 00	24	9.939.50 0	12	11.407.6 00	3	0	3	9.258.348	3	0	3	1.187.411	12	10.445.7 59	27	20.385.25 9	22,50 %	20,39 %
		5.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	72.500.00 0	4	4.074.50 0	2	4.999.80 0	1	0	0	0	0	0	0	4.571.984	1	4.571.98 4	5	8.646.484	100,00 %	11,93 %
		5.01.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	22.000.00 0	1	2.315.60 0	2	2.601.60 0	0	0	1	1.719.055	1	686.912	0	0	2	2.405.96 7	1	4.721.567	20,00 %	21,46 %
		5.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Penataan barang milik daerah yang tertib, teratur dan efektif (%)	100, 00	45.000.00 0	20,0 0	7.194.89 6	100, 00	5.208.70 0	12,5 0%	0	0,00 %	2.540.077	0,00 %	0	0,00 %	2.385.567	100 %	4.925.64 4	22,5 0%	12.120.54 0	22,50 %	26,93 %
		5.01.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	25.000.00 0	4	3.405.89 6	4	2.530.30 0	1	0	0	0	0	0	0	2.385.567	1	2.385.56 7	5	5.792.463	25,00 %	23,17 %
		5.01.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	10	20.000.00 0	2	3.789.00 0	2	2.678.40 0	1	0	1	2.540.077	1	0	1	0	4	2.540.07 7	2	6.329.077	20,00 %	31,65 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Daerah pada SKPD																					
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kepuasaan Layanan administrasi kepegawaian SKPD (%)	100,00	547.000,00	4,29	3.875,00	100,00	50.620,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	46.297,80	100%	46.297,80	4,29%	50.172,80	4,29%	9,17%	
		5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	160.000,00	0	0	61	30.500,00	0	0	0	0	0	0	61	27.084,00	61	27.084,00	61	27.084,00	0,00%	16,93%	
		5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35	387.000,00	3	3.875,00	1	20.120,00	0	0	0	0	0	1	19.213,80	1	19.213,80	3	23.088,80	8,57%	5,97%		
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Kantor (%)	100,00	2.786.901,705	80,92	557.331,271	100,00	561.155,200	0,00%	53.670,659	0,00%	154.729,661	0,00%	111.184,830	0,00%	240.690,688	100%	560.275,838	80,92%	1.117.607,109	80,92%	40,10%	
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	175.000,00	12	20.437,300	12	21.436,200	3	2.050,00	3	7.473,650	3	7.325,120	3	4.586,997	12	21.435,747	12	41.873,047	20,00%	23,93%	
		5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5	175.000,00	12	11.320,00	12	13.945,00	12	3.055,00	0	3.140,000	0	3.270,00	0	3.655,000	12	13.120,00	12	24.440,00	240,00%	13,97%	
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	2.332.101,705	131	472.533,971	60	471.174,000	7	48.565,659	39	144.116,011	87	100.589,710	54	177.848,711	187	471.120,091	131	943.654,062	43,67%	40,46%	
		5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	5	104.800,00	1	53.040,00	1	54.600,00	0	0	0	0	0	0	1	54.600,00	1	54.600,00	1	107.640,00	20,00%	102,71%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)			
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
				Elektronik pada SKPD																					
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (%)	100,00	355.000,00	0,00	0	100,00	59.775,200	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	90.000,00	0	0	3	9.266,00	0	0	0	0	0	0	3	8.880,000	3	8.880,000	0	8.880,000	0,00%	9,87%	
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	250.000,00	5	53.200,00	4	66.500,00	0	0	0	0	0	4	65.999,99	4	65.999,99	5	119.199,99	14,29%	47,68%		
		5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	105.000,00	1	4.600,00	5	44.092,100	0	0	0	28.189,350	0	0	5	0	5	28.189,350	1	32.789,350	2,50%	31,23%	
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	2.060.684,000	20,00	241.753,744	100,00	286.844,300	0,00%	52.079,211	0,00%	94.873,088	0,00%	72.607,611	0,00%	63.250,102	100%	282.810,012	20,00%	524.563,756	20,00%	25,46%	
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	215.000,00	1	26.888,144	1	27.872,000	0	7.229,211	0	8.737,098	0	4.351,974	1	6.516,711	1	26.834,994	1	26.834,994	20,00%	24,99%	
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1.845.684,000	1	214.865,600	1	214.972,300	0	44.850,000	0	68.135,990	0	68.255,637	1	56.733,391	1	255.975,018	1	255.975,018	20,00%	25,51%	
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100,00	722.200,00	30,83	181.508,015	100,00	341.505,000	0,00%	57.092,498	0,00%	100.903,269	0,00%	39.593,852	0,00%	141.582,515	100%	339.172,134	30,83%	520.680,149	30,83%	72,10%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		
					6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		5.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85	503.000.000	17	135.395.955	17	172.370.000	0	22.052.398	0	32.527.469	0	23.846.852	21	91.676.155	21	170.102.874	17	305.498.829	20,00%	60,74%	
		5.01.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	12.500.000	2	2.445.900	3	2.960.000	0	0	0	0	0	0	3	2.952.400	3	2.952.400	2	5.398.300	13,33%	43,19%	
		5.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	35.000.000	7	6.275.000	6	12.210.000	0	0	0	6.019.400	0	0	8	6.190.600	8	12.210.000	7	18.485.000	11,67%	52,81%	
		5.01.01.2.0 9.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	15.200.000	2	7.969.360	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0	1	3.969.360	1	3.969.360	2	11.938.720	100,00%	78,54%	
		5.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	110.000.000	1	21.915.800	1	138.985.000	0	32.540.100	0	58.588.400	0	12.810.000	1	35.044.000	1	138.982.500	1	160.898.300	20,00%	146,27%	
		5.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70	46.500.000	14	7.506.000	14	10.980.000	0	2.500.000	0	3.768.000	0	2.937.000	18	1.750.000	18	10.955.000	14	18.461.000	20,00%	39,70%	
		5.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Persentase Fasilitas Penataan Organisasi (%)	100,00	0	0,00	0	100,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
		5.01.01.2.1 4	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (%)	100,00	0	0,00	0	100,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
2	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanan			Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	95	16.495.504.683	90	1.446.285.929	95	890.124.700	0	16.256.740	0	200.189.258	0	127.569.606	100%	514.031.867	100%	858.387.131	100%	2.304.673.060			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)			
											I		II		III		IV									
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	aan pembangunan daerah																									
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	90,00	9.661.493.458	0,00	911.448.329	95,00	532.929.600	0	10.998.800	0	129.198.477	0	76.796.393	100%	299.661.093	100%	516.654.763	100%	1.428.103.092				
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan (%)	100,00	6.066.493.458	21,76	656.169.129	95,00	324.332.900	50,00%	10.998.800	0,00%	124.722.460	0,00%	70.661.847	0,00%	104.018.740	100%	310.401.847	33,43%	966.570.976	35,19%	15,93%		
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	8	540.000.000	2	38.923.200	2	18.779.900	1	4.893.800	0	11.517.290	1	0	0	0	2	16.411.090	3	55.334.290	37,50%	10,25%		
		5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	8	1.670.000.000	2	83.386.577	2	20.181.000	1	1.680.000	0	12.941.200	1	4.843.652	0	0	2	19.464.852	3	102.851.429	37,50%	6,16%		
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8	420.000.000	2	13.128.000	2	7.271.700	2	0	0	5.375.808	0	0	0	0	2	5.375.808	4	18.504.408	50,00%	4,41%		
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8	765.000.000	1	61.555.400	2	25.571.100	0	0	2	23.587.430	0	0	0	0	2	23.587.430	1	85.142.830	12,50%	11,13%		
		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	220	590.000.000	440	47.751.400	440	6.615.000	440	4.425.000	0	1.624.732	0	0	0	0	440	6.049.732	880	53.801.132	40,00%	9,12%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)	
					6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	13	2.081.493.458	3	411.423.952	3	245.914.200	0	0	1	69.676.000	1	65.818.195	1	104.018.740	3	239.512.935	3	650.936.887	23,08 %	31,27 %
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan (%)	100,00	1.895.000.000	20,00	41.234.500	100,00	21.786.900	33,33%	0	0,00%	4.476.017	0,00%	4.304.100	0,00%	11.646.794	100%	20.426.911	26,67%	61.661.411	26,67 %	3,25 %
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5	585.000.000	1	14.218.700	1	7.612.500	0	0	1	2.447.199	0	4.304.100	0	0	1	6.751.299	1	20.969.999	20,00 %	3,58 %
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	140	680.000.000	28	9.812.800	28	5.956.200	28	0	0	2.028.818	0	0	0	3.450.000	28	5.478.818	56	15.291.618	20,00 %	2,25 %
		5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5	630.000.000	1	17.203.000	1	8.218.200	0	0	0	0	0	0	1	8.196.794	1	8.196.794	1	25.399.794	20,00 %	4,03 %
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang	100,00	1.700.000.000	20,00	214.044.700	100,00	186.809.800	0%	0	0,00%	0	0,00%	1.830.446	100%	183.995.559	100%	185.826.005	22,05%	399.870.705	22,50 %	23,52 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)			
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				dimanfaatkan (%)																					
		5.01.02.2.0 3.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10	775.000.000	2	14.650.800	2	9.128.400	0	0	1	0	0	1.830.446	1	6.883.800	2	8.714.246	2	23.365.046	20,00%	3,01%	
		5.01.02.2.0 3.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	20	925.000.000	4	199.393.900	4	177.681.400	1	0	1	0	1	0	177.111.759	4	177.111.759	5	376.505.659	25,00%	40,70%		
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	95,00	6.834.011.225	0,00	534.837.600	95,00	357.195.100	0	5.257.940	0	70.990.781	0	50.773.213	100%	214.370.774	100%	341.732.368	100%	876.569.968	16,67%		
		5.01.03.2.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100,00	2.671.572.861	15,00	327.640.700	95,00	170.510.500	50,00%	5.257.600	0,00%	52.174.579	0,00%	26.683.008	50%	79.861.579	100%	163.976.766	16	491.617.466	266,67%	18,40%	
		5.01.03.2.0 1.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55	390.000.000	11	13.310.200	11	15.000.000	11	5.257.600	0	4.627.010	0	3.500.700	0	750.000	11	14.135.310	22	27.445.510	366,67%	7,04%	
		5.01.03.2.0 1.0002	Asistensi Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi	55	140.000.000	11	9.475.200	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	22	9.475.200	366,67%	6,77%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)						
								I		II		III		IV				13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																				
		5.01.03.2.0 1.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5	382.172.861	1	14.619.500	1	15.287.700	0	0	0	7.200.000	0	3.000.000	1	4.326.321	1	14.526.321	2	29.145.821	33,33 %	7,63 %
		5.01.03.2.0 1.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5	350.000.000	0	35.783.600	1	15.034.600	0	0	0	12.426.369	0	0	1	832.500	1	13.258.869	1	49.042.469	16,67 %	14,01 %
		5.01.03.2.0 1.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25	560.000.000	5	31.615.100	5	419.700	55	0	0	0	366.108	0	0	5	366.108	10	31.981.208	166,67 %	5,71 %	
		5.01.03.2.0 1.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25	60.000.000	5	7.904.600	5	10.000.000	5	0	0	0	0	0	9.343.933	5	9.343.933	10	17.248.533	166,67 %	28,75 %	
		5.01.03.2.0 1.0007	Pelaksanaan Monitoring dan	Jumlah Laporan Hasil	5	425.000.000	1	133.692.100	1	45.492.000	0	0	0	7.650.000	0	2.250.000	1	35.111.431	1	45.011.431	2	178.703.531	33,33 %	42,05 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)	
					6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																				
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5	364.400.000	0	81.240.400	1	69.277.100	0	0	0	20.271.200	0	17.566.200	1	29.497.394	1	67.334.794	1	148.575.194	16,67%	40,77%
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (%)	100,00	1.918.561.411	15,56	60.504.700	95,00	68.329.300	50,00%	0	0,00%	3.747.672	0,00%	2.849.700	100%	55.448.950	100%	62.046.322	17	122.551.022	276,00%	6,39%
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18	293.845.076	4	13.689.700	4	5.328.000	4	0	0	327.672	0	0	0	4.760.600	4	5.088.272	8	18.777.972	133,33%	6,39%
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	18	90.485.603	4	6.187.300	4	3.565.200	4	0	0	0	0	0	0	632.800	4	632.800	8	6.820.100	133,33%	7,54%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)						
								I		II		III		IV				13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
			Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																				
		5.01.03.2.0 2.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5	325.000.0 00	1	2.874.60 0	1	14.868.0 00	0	0	0	0	0	2.550.00 0	1	11.995.40 0	1	14.545.4 00	2	17.420.00 0	33,33 %	5,36 %
		5.01.03.2.0 2.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5	300.000.0 00	0	0	1	7.297.30 0	0	0	0	0	0	0	1	6.029.150	1	6.029.15 0	1	6.029.150	16,67 %	2,01 %
		5.01.03.2.0 2.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	220.000.0 00	3	27.916.0 00	3	4.932.40 0	3	0	0	0	0	0	0	4.808.300	3	4.808.30 0	6	32.724.30 0	100,0 0%	14,87 %
		5.01.03.2.0 2.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15	68.000.00 0	3	2.966.90 0	3	2.370.00 0	3	0	0	2.070.000	0	299.700	0	0	3	2.369.70 0	6	5.336.600	100,0 0%	7,85 %
		5.01.03.2.0 2.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	5	336.000.0 00	1	6.870.20 0	1	24.721.7 00	0	0	0	1.350.000	0	0	1	22.171.70 0	1	23.521.7 00	2	30.391.90 0	33,33 %	9,05 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		
											I		II		III		IV							
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																				
		5.01.03.2.0 2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5	285.230.732	0	0	1	5.246.700	0	0	0	0	0	0	1	5.051.000	1	5.051.000	1	5.051.000	16,67%	1,77%
		5.01.03.2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah (%)	100,00	2.243.876.953	20,00	146.692.200	95,00	118.355.300	50,00%	340	0,00%	15.068.530	0,00%	21.240.505	50%	79.060.245	100%	115.709.280	21	262.401.480	350,00%	11,69%
		5.01.03.2.0 3.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20	332.628.925	4	49.848.000	4	6.000.000	4	0	0	3.500.700	0	0	0	2.360.913	4	5.861.613	8	55.709.613	133,33%	16,75%
		5.01.03.2.0 3.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20	50.000.000	4	2.259.600	4	3.843.500	4	0	0	1.380.000	0	0	0	2.251.100	4	3.631.100	8	5.890.700	133,33%	11,78%
		5.01.03.2.0 3.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan	5	350.000.000	1	58.156.000	1	35.817.000	0	340.000	0	0	0	14.400.000	1	21.026.369	1	35.766.369	2	93.922.369	33,33%	26,83%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)						
								I		II		III		IV				13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																				
		5.01.03.2.0 3.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5	425.000.000	1	10.252.400	1	12.911.000	0	0	0	9.706.900	0	3.045.100	1	159.000	1	12.911.000	2	23.163.400	33,33 %	5,45 %
		5.01.03.2.0 3.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55	224.586.928	11	19.000.800	11	5.458.000	11	0	0	180.930	0	3.500.700	0	373.100	11	4.054.730	22	23.055.530	366,6 7%	10,27 %
		5.01.03.2.0 3.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	55	51.661.100	11	2.802.800	11	3.591.000	11	0	0	0	0	294.705	0	3.170.100	11	3.464.805	22	6.267.605	366,6 7%	12,13 %
		5.01.03.2.0 3.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5	400.000.000	1	3.078.800	1	45.099.800	0	0	0	300.000	0	0	1	44.493.597	1	44.793.597	2	47.872.397	33,33 %	11,97 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)	
					6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5	410.000.000	1	1.293.800	1	5.635.000	0	0	0	0	0	0	1	5.226.066	1	5.226.066	2	6.519.866	33,33 %	1,59 %
3	Meningkatkan penerapan kelibang an (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas			Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik (%)	100	2.920.000.000	100	344.412.675	100	353.965.500	0	5.337.600	0	82.618.325	0	169.387.315	100 %	90.925.560	100 %	349.266.253	100 %	349.266.253		
		5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki atau mengusulkan inovasi yang sesuai standar (%)	0,00	770.000.000	0,00	0	100,00	353.965.500	0	5.337.600	0	82.618.325	0	169.387.315	100 %	90.925.560	100 %	349.266.253	100 %	349.266.253		
		5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang di manfaatkan (%)	100,00	460.000.000	0,00	0	100,00	346.000.200	0,00 %	5.337.600	0,00 %	82.618.325	0,00 %	164.163.800	100	90.924.562	100	343.044.287	100	343.044.287	16,66 667 %	74,57 %
		5.05.03.2.01.01	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan,	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan,	2	50.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		
											I		II		III		IV							
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
			pengkajian, dan penerapan	pengkajian, dan penerapan																				
		5.05.03.2.0 1.02	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	2	115.000.000	0	0	1	153.339.100	0	0	0	57.262.720	0	12.363.800	2	83.320.473	2	152.946.993	2	152.946.993	33%	133,00%
		5.05.03.2.0 1.03	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	10	95.000.000	0	0	5	38.361.100	0	2.693.800	0	24.609.685	0	1.800.000	5	6.812.981	5	35.916.466	5	35.916.466	83%	37,81%
		5.05.03.2.0 1.06	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	2	200.000.000	0	0	1	154.300.000	0	2.643.800	0	745.920	0	150.000.000	0	791.108	1	154.180.828	1	154.180.828	17%	77,09%
		5.05.03.2.0 2	Invensi dan Inovasi	Persentase Invensi dan Inovasi yang di manfaatkan (%)	100,00	310.000.000	0,00	0	100,00	7.965.300	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.223.515	100	998	100	6.221.966	100	6.221.966	16,66667	2,01%
		5.05.03.2.0 2.03	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	2	55.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,00%
		5.05.03.2.0 2.06	Fasilitasi dan pembinaan untuk	Jumlah laporan fasilitasi dan	2	65.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,00%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K
1					6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
			peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)																					
		5.05.03.2.0 2.12	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	4	190.000.000	0	0	2	7.965.300	0	0	0	0	0	5.223.515	2	998.451	2	6.221.966	2	6.221.966	33%	3,27%	
					Total Target (RP)				6.036.201.400				Total Realisasi (RP)				5.815.150.634								
													Rata-rata capaian kinerja (%)				38,04		96,34						
																	Predikat kinerja		SR		ST				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

BAB 4

PENUTUP

Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan informasi kepada publik, pemangku kepentingan, dan pemerintah mengenai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar. Laporan ini mencakup evaluasi terhadap rencana kerja, capaian kinerja, realisasi keuangan, pengelolaan sumber daya, tingkat transparansi, serta rekomendasi tindak lanjut berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Bupati Kepulauan Selayar.

Keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil dari kerja sama dan partisipasi berbagai pihak, yang diharapkan dapat terus ditingkatkan. Sementara itu, target yang belum tercapai memerlukan dukungan dan antisipasi bersama.

Ringkasan Hasil Capaian Kinerja Tahun 2025 :

1. Dari analisis dua indikator tujuan strategis, satu indikator tujuan dan satu indikator sasaran belum dapat diukur, sedangkan capaian realisasi kinerja secara keseluruhan mencapai 103,57%.
2. Dari analisis lima indikator sasaran strategis, hanya satu indikator sasaran yang belum dapat diukur, dengan realisasi capaian kinerja juga sebesar 103,57%.
3. Realisasi keuangan Bapperida tahun 2025 mencapai Rp.5.814.150.634, atau 96,32% dari anggaran yang ditetapkan.
4. Berdasarkan lima indikator kinerja utama dan data keuangan, tercapai efisiensi anggaran sebesar 91,51% dengan tingkat efisiensi 109%, yang menunjukkan kinerja yang sangat efisien.
5. Capaian kinerja tahun 2025 dipengaruhi secara positif oleh konsistensi pelaksanaan program, koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan, ketersediaan data pembangunan yang komprehensif, serta kontribusi kegiatan riset dalam pengambilan kebijakan perencanaan;

Rencana Tindak Lanjut:

Untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kinerja ke depan, dirumuskan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan komitmen bersama dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengendali yang objektif dan transparan dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam aspek perencanaan, pembangunan, riset, dan inovasi.
- Melakukan diseminasi data pembangunan dan hasil riset kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Meningkatkan penerapan hasil riset ke dalam perumusan kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan inovasi pelayanan publik, guna memperkuat sistem perencanaan dan pengendalian dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2025, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan tahun berikutnya, pelaksanaan program dan kegiatan mendatang, serta kebijakan-kebijakan yang diperlukan guna mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih maju dan lebih baik.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.
N I P : 19840104 200903 2 003
Pangkat, Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Masa Kerja Jabatan : 1 Tahun 8 Bulan
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Apabila saya tidak menunjukkan kemampuan dalam mencapai kinerja yang telah disepakati sesuai **Perjanjian Kinerja**, maka dengan sukarela **Mengundurkan Diri** dari jabatan saya setelah dilakukan evaluasi.
2. Melepaskan jabatan yang saya emban secara tulus dan ikhlas, tanpa tuntutan apapun juga.
3. Sebagai Pegawai ASN yang bertanggung jawab, saya berjanji akan tetap membantu suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di mana pun saya ditempatkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Benteng, 15 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah (di semua level dokumen perencanaan)	Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah	95%
2	Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil riset dan penerapan inovasi daerah yang dimanfaatkan	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang akuntabel berbasis akrual	Nilai SAKIP	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 70.000.000,00	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 99.991.000,00	
3	Program Riset dan Inovasi Daerah	Rp. 55.000.000,00	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.538.562.500,00	
TOTAL		Rp. 3.763.553.500,00	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MUHAMMAD NATSIR ALI

Benteng, 15 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19840104 200903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Telepon / Fax (0414) 21070

laman : <https://bapperida.kepulauanselayarkab.go.id>, email : bapperidaselayar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD NATSIR ALI

Jabatan : Bupati Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Apabila gagal mewujudkan target kinerja sebagaimana yang telah disepakati pada lampiran perjanjian ini, maka kami bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut di atas dengan melampirkan surat pernyataan mundur.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MUHAMMAD NATSIR ALI

Benteng, 15 Januari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19840104 200903 2 003